

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Abburasyid Priyatna, *Hukum Penyelesaian Sengketa*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2013)

Adrian Sutedi, *Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya*, (Jakarta: Sinar Grafik, 2007)

_____, *Sertifikat Hak Atas Tanah*, (Jakarta: Sinar Gafik, 2014)

Agus Surono, *Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (PAT)*, (Jakarta : Fakultas Hukum Al Azhar Indoneisa, 2013)

Ali Achmad Chomzah, *Hukum Pertanahan Seri Hukum Pertanahan III- Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah dan Seri Hukum Pertanahan IV- Pengadaan Tanah Instansi Pemerintah*, (Jakarta : Prestasi Pustaka, 2003)

Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2005)

A .P. Parlindungan, *Pendaftaran Tanah di Indonesia*, (Bandung: : Mandar Maju, 1990)

Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia : Sejarah Pembentukan Undang— Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaanya*, (Jakarta: Djambatan, 1999)

Dean G Pruit, *Konflik Sosial*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2004)

Efendi Bachtiar, *Pendaftaran Tanah di Indonesia dan Peraturan-Peraturan Pelaksanannya*, (Bandung: Alumni Bandung, 1993)

Effendi Perangin, *Hukum Agraria Indonesia Suatu Telaah Dari Sudut Pandang Praktisi Hukum*, (Jakarta : PT Raja Grafindo, 1993)

Ganjong, *Pemerintah Daerah Kajian Politik dan Hukum*, (Bogor : Ghalia Indonesia, 2007).

Hans Kelsen, *Teori Hukum Murni Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif*, (Bandung : Nusa Media, 2014)

IGN G Susila, *Kejahatan Sertifikat Ganda*, (Malang : UB Press, 2014), hal 41

Irawan Soerodjo, *Kepastian Hukum Hak Atas Tanah Di Indoneisa*, (Surabaya : Arkota, 2023)

Mudakir Iskandar Syah, *Panduan Mengurus dan Penyelesaian sengketa Tanah*, (Jakarta : Kelompok Gramedia, 2019) hal 162

Muhamad Yamin dan Abdul Rahim, *Hukum Pendaftaran Tanah*, (Jakarta : Mandar Maju, 2008)

Rusmadi Murad, *Menyingkap Tabir Masalah Pertanahan*, (Bandung : Mandar Maju, 2007) hal 75

_____, *Penyelesaian Sengketa Tanah* (Bandung : Alumni , 1999) hal 22 - 23

S.F. Marbun, *Hukum Administrasi Negara*, (Yogyakarta : UII Pres Yogyakarta, 2023)

Soejono Soekanto, *Penegakan Hukum*, (Bandung : Bina Cipta, 1993)

Sudjito, PRONA : *Pensertifikatan Tanah-Tanah Secara Masal dan Penyelesaian Sengketa Tanah Yang Bersifat Strategis*, (Yogyakarta : Liberty, 1987)

Sudikno Mertokusumo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993)

Teguh Santoso, *Panduan Praktis Mengurus Sertifikat Hak dan Perizinannya*, (Yogyakarta : Buku Pintar, 2014)

Urip Santoso, *Hukum Agraria Kajian Komperhensif* , (Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri, 2013)

Utoyo Sutopo, *Masalah Penyalahgunaan Sertifikat Dalam Masyarakat dan Penanggulangannya* (Yogyakarta : Liberty, 2009)

Jurnal:

Ayni Suwarni Herry, “Analisis Yuridis Surat Keterangan Girik Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria”, *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran*, Vol. 7, No. 1, 2024. DOI: <https://doi.org/10.31004/jrpp.v7i1.25846>

Edralin Widyarini Indriasti Wardani, “Kepemilikan Pemegang Hak Atas Tanah Bekas Eigendom Verponding Setelah Konversi Undang-Undang Pokok Agraria”, *Jurnal Notary Law Research*, Vol. 5, No. 1, 2023. DOI: 10.56444/NLR

Giandiva Fahlika Erizal, ”Penerapan Sistem Pendaftaran Tanah Yang Menggunakan Stelsel Negatif Bersendikan Positif Pada Objek Tanah Yang Telah Terdaftar Di Kantor Pertanahan”, *Jurnal Notarius UMSU*, Vol.2, No.1, 2023

Linda S M Sahono , “Penerbitan Sertifikat Hak Atas Tanah dan Implikasi Hukum”
Jurnal Perspektif, Vol 7, No 2, 2012
<https://doi.org/10.30742/perspektif.v17i2.98>

Hasil Penelitian

Delfha Musfija, “Pengukuran dan Pemetaan Bidang Tanah PTSL di desa Marunggi dengan metode Real Team Kinematic (RTK), Laporan Kerja Praktek : Padang: Faskultas Teknik, Institut Teknologi Padang”, Padang : 2021

Esmi Warsih, “Implementasi Kebijakan Pemerintah Melalui Perasturan Perundang dalam Perspektif Sosiologis”, Surabaya : Desertasi Program Pasca Sarjana Universitas Airlangga , 1991)

Maria R Ruwiasuti, “Menuju Agraria Analisa dan Kritik Terhadap Marginal Posisi Hukum-Hukum dan Hak-Hak Adat Penduduk Asli Atas Sumber-Sumber Agraria Menuju Penegakan Hak-Hak Rakyat Atas Dasar Sumber-Sumber Agraria , Konsorsium Reformasi Hukum Nasional (KRHN) dan Konsorsium Pembaharuan Agraria (KPA)”, Bandung , 1998

Esmi Warsih, “Implementasi Kebijakan Pemerintah Melalui Perasturan Perundang dalam Perspektif Sosiologis”, Surabaya : Desertasi Program Pasca Sarjana Universitas Airlangga , 1991)

Vika Mega Hardhani, “Tanggung Jawab Kepala Kantor Pertanahan Atas Penerbitan Sertifikat Gandan, Tesis, Malang : Kementerian Riset Tekhnologi dan Pendidikan Tinggi Program Studi Magister Kenotariatan, Universitas Brawijaya, 2019”.

Seminar

Bagir Manan, Wewenang Provinsi Kabupaten dan Kota Dalam Rangka Otonomi Daerah, Makalah pada Seminar Nasional Pengembangan Wilayah dan Pengelolaan Sumber Daya Alam di Kawasan Pesisir Dalam Rangka Penataan Ruang. (Fak Hukum Unpad Bandung, 2000),

M. Hardjon Philipus, Tentang Wewenang, Makalah Universitas Airlangga Yuridika No 5 dan Sony Harsono, “Kegunaan Sertifikat dan Permasalahannya”, (Yogyakarta : Seminar Nasional : 1992) 6 Tahun XII, 1997, hal 1.

Sony Harsono, “Kegunaan sertifikat dan permasalahannya “, Yogyakarta: Seminar Nasional , 1992

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 2043)

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5602)

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59)

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah

Sistimatis Lengkap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 255)

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 28, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6630)

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1369)

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 953)

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penerbitan Dokumen Elektronik dalam Kegiatan Pendaftaran Tanah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 461)

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2022 Tentang Pelimpahan Kewenangan Penetapan Hak Atas Tanah dan Kegiatan Pendaftaran Tanah

Website/Internet

Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional , “Target PTSL 2025 Sebesar 1,5 juta Bidang , Menteri Nusron : Strategi Efisiensi dan Penyesuaian Tanah yang Tersisa”, <https://www.atrbpn.go.id> , diakses 6 Maret 2025

Kamus :

Kemdikbud, Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, (Indonesia: Kemdikbud, 2016). <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/penjara>

Henry Campbell, Black’S Law Dictionary, (West Publishing, 1990),

Wawancara:

Hasil Wawancara dengan Andi Renald, Direktur Pengendalian Hak Tanah, Alih Fungsi Lahan, Kepulauan dan Wilayah Tertentu, Kantor Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional , Jakarta tanggal 20 Mei 2025 pukul 14: 30 Wib

Hasil Wawancara Shinta Purwitasari, Kepala Kantor Pertanahan Kota Tangerang Selatan, Kantor Pertanahan Kota Tangerang Selatan, Tangerang Selatan tanggal 21 April 2025 pukul 14:10 WIB